



ISSN : 2339 - 1871

JURNAL ILMIAH BETRIK

Besemah Teknologi Informasi dan Komputer

Editor Office : LPPM Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam, Jln. Masik Siagim No. 75
Simpang Mbacang, Pagar Alam, SUM-SEL, Indonesia
Phone : +62 852-7901-1390.
Email : betrik@sttpagaralam.ac.id | admin.jurnal@sttpagaralam.ac.id
Website : <https://ejournal.sttpagaralam.ac.id/index.php/betrik/index>

PEMETAAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP KETERBUKAAN DATA

Emigawaty¹, Ahmad Luthfi²

¹Program Studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta

²Program Studi Informatika Universitas Islam Indonesia

Sur-el: emigawaty@amikom.ac.id¹, ahmad.luthfi@uii.ac.id²

Abstrak: Peran pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk membuka data pada ranah publik adalah sangat penting dan sentral. Di Indonesia, institusi pemerintah merupakan organisasi penyedia data (*data providers*) primer sekaligus yang berwenang untuk menentukan jenis kumpulan data (*datasets*) mana saja yang boleh diungkapkan ke masyarakat. Namun demikian, proses pengambilan keputusan untuk membuka kumpulan data (*dataset*) yang dilakukan oleh institusi pemerintah bukanlah hal yang sepele dan menghadapi beberapa tantangan. Disaat yang sama, pemangku kepentingan dapat memiliki perbedaan pandangan tentang keterbukaan data, dan karenanya bisa menjadi pro dan kontra sangat mungkin terjadi antara mereka. Beberapa penyebab potensi perselisihan dalam pengambilan keputusan ini karena beberapa hal, seperti perbedaan tujuan, kepentingan, dan kebutuhan diantara pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan peran pemangku kepentingan terhadap pengambilan keputusan keterbukaan data. Dalam rangka pemetaan peran, penelitian ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan dari internal institusi pemerintah seperti pengambil keputusan (*decision-maker*), analis data (*data analyst*), dan penyaji data (*data evangelist*). Hasil pemetaan ini mengindikasikan bahwa setiap pemangku kepentingan mengusulkan perpaduan unik antara keahlian, legitimasi, pengalaman, budaya menghindari resiko, dan juga potensi kebermanfaatannya dalam pengambilan keputusan untuk membuka data ke wilayah publik. Berdasarkan hasil studi kasus dengan pendekatan wawancara semi-struktur, dapat disimpulkan bahwa pengambil keputusan (*decision-maker*) cenderung kepada pertimbangan faktor efisiensi manfaat dan risiko. Analis data (*data analyst*) memiliki peran penting dalam menimbang manfaat dan risiko. Sementara itu, pelayan data (*data evangelist*) berperan dalam aspek analisis teknis yang mendalam untuk membantu pengambilan keputusan berbasis bukti atau referensi yang kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memberikan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam bentuk pemetaan peran dan minat untuk mengubah keadaan saat ini dari posisi pemangku kepentingan kepada keadaan yang diinginkan dalam agenda masa depan.

Kunci Utama: keputusan; keterbukaan data, pemangku kepentingan, pemetaan

Abstract: *The role of stakeholders in government agencies in making decisions to disclose dataset in the public domain is very important and fully central. In Indonesia, government institutions are primary data providers and have the authority to determine which types of datasets may be disclosed to the public. Nevertheless, the decision-making process to open datasets carried out by government institutions is cumbersome and faces several challenges. At the same time, stakeholders can have different perspective on data disclosure, and therefore there can be pros and cons between them. Some of the causes of potential disputes in this decision making are*

because of several factors, such as differences in goal settings, interests, and requirements among stakeholders. The purpose of this study is to map the role of stakeholders in making data disclosure decisions. In order to map roles, this research involves several stakeholders from internal government institutions such as decision-makers, data analysts, and data evangelists. The results of this mapping indicate that each stakeholder proposes a unique blend of expertise, legitimacy, experience, risk-averse culture, as well as potential usefulness in making decisions to disclose data to the public domain. Based on the results of a case study using a semi-structured interview approach, it can be concluded that the decision-maker tends to consider the benefits and risks efficiency factors. Data analysts have an important role in weighing the benefits and risks. Meanwhile, data evangelists also play an essential role in in-depth technical analysis aspects to make stronger evidence-based or reference-based decision-making. This research contributes to providing the level of stakeholder involvement in the form of mapping roles and interests to change the current state of the stakeholder position to the desired state in the government strategic plan.

Keywords : *decision, open government data, stakeholder, map*

1. PENDAHULUAN

Proses pengambilan keputusan untuk membuka kumpulan data (*dataset*) yang dilakukan oleh institusi pemerintah bukanlah hal yang sepele dan menghadapi banyak tantangan. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah keterlibatan pemangku kepentingan yang memiliki berbagai kepentingan dan perhatian dalam proses pengambilan keputusan, seperti pengambil kebijakan strategis, pengambil keputusan, analis data, para penyedia dan pelayan data, sampai kepada petugas administrasi, semua dengan perspektif dan kepentingan yang berbeda [1]. Para pemangku kepentingan ini memainkan perannya yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan pembukaan data mulai dari menetapkan tujuan dan ambisi hingga pembukaan data yang sebenarnya [2].

Beberapa perbedaan latar belakang pemangku kepentingan dalam hal peran dan kepentingannya, pandangan politik dan kerangka kelembagaan, kendala dan tekanan ekonomi, budaya yang merugikan risiko, dan pengetahuan teknis, semuanya merupakan faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembukaan data [3]. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan menjadi rumit, dan manfaat membuka data seperti menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan keterlibatan warga menjadi sulit terwujud. Selain itu, peran

dan kepentingan pemangku kepentingan yang dinamis dan heterogen dalam membuka data pemerintah dapat menciptakan pengambilan keputusan yang tidak konsisten dan memicu pro kontra dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kondisi terkait dinamisasi dalam pengambilan keputusan tentang status dataset apakah bisa dibuka ke publik atau harus ditutup karena beberapa alasan. Keragaman latar belakang pemangku kepentingannya, beragam interpretasi regulasi yang ketat dan mengikat seperti peraturan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008), pengetahuan dan keahlian yang terbatas, kurangnya keterampilan pribadi, dan hambatan penerimaan teknologi di tingkat manajemen semuanya mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembukaan data [4][5].

Konsekuensinya, proses pengambilan keputusan menjadi kabur (*fuzzy*), dan tujuan pembukaan data sulit untuk tercapai. Selain itu, perbedaan peran dan kepentingan para aktor yang heterogen dalam internal organisasi pemerintahan dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan yang tidak terarah dan tepat dan bisa mengalami keterlambatan.

Sebagai ilustrasi, dalam wawancara yang dilakukan didapatkan informasi bahwa beberapa pengambil keputusan

(*decision-makers*) mungkin memiliki otoritas tinggi untuk mengambil keputusan apakah mempublikasikan atau menutup sebuah kumpulan data (*dataset*). Disaat yang sama, beberapa analisis data mungkin cenderung menghindari risiko dalam membuka data seperti aspek perlindungan data pribadi atau organisasi. Sementara itu, pemangku kepentingan lain lebih fokus hanya membuka kumpulan data tanpa memikirkan kemungkinan konsekuensi negatif. Secara umum, persepsi pro dan kontra dari keterbukaan data bisa berbeda diantara para pemangku kepentingan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemangku kepentingan dan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan untuk membuka data. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar dalam melakukan pemetaan peran pemangku kepentingan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada pengamatan lebih mendalam terhadap fenomena peranan pemangku kepentingan di internal pemerintahan dalam pengambilan keputusan untuk membuka kumpulan data. Selain itu, pemilihan metode kualitatif ini adalah untuk menjangkau faktor humanisme atau individu manusia termasuk aspek internal para pemangku kepentingan di internal pemerintahan. Beberapa aspek yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam membuka data yang menjadi landasan teknik pengambilan data kualitatif dalam penelitian ini seperti kepercayaan, pandangan politik, pengetahuan dan pengalaman dalam pengambilan keputusan, latar belakang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, serta peranan mereka sebagai pemegang jabatan struktural dan fungsional di bidang tertentu di pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan strategi dan pendekatan studi kasus (*case study*) dan wawancara terpusat (*focused interviews*) semi-terstruktur untuk menggali informasi

yang lebih komprehensif yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan sebagai direksi pencapaian tujuan penelitian.

Secara garis besar alur metode penelitian ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu (1) pengumpulan data, (2) kajian literatur, dan (3) analisis data. Adapun hirarki metode penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Pengumpulan data

Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terpusat (*focused interviews*) semi-terstruktur terhadap beberapa pemangku kepentingan.

Pada penelitian ini, tim peneliti menggunakan pendekatan studi kasus pengadaan elektronik (*e-procurement*) di Indonesia untuk menangkap konteks proses pengambilan keputusan untuk keterbukaan data di wilayah publik menggunakan wawancara kualitatif semi-terstruktur.

Wawancara kualitatif atau disebut juga wawancara intensif atau wawancara mendalam [6]. Wawancara ini dianggap semi-terstruktur karena peneliti memiliki topik tertentu yaitu di bidang pemangku kepentingan dalam membuka data pemerintah untuk responden [7]. Meskipun ruang lingkup responden yang terbatas, pertanyaan dirancang bersifat terbuka dan tidak dengan cara atau urutan yang sama tidak persis kepada setiap responden. Tujuan utama wawancara mendalam adalah untuk mendengar apa yang menurut responden penting tentang fenomena pengambilan keputusan dalam membuka data.

Untuk itu, penelitian ini telah merancang tiga langkah utama dalam pengumpulan data dengan metode wawancara terpusat semi-terstruktur [7], [8].

1. Persiapan memilih responden (*respondent selection preparation*). Pada

tahap ini, peneliti mempersiapkan mekanisme pemilihan kandidat responden sebagai peserta utama wawancara. Beberapa pertimbangan yang diambil dalam proses pemilihan responden adalah (1) secara demografi partisipan adalah berasal dari internal organisasi pemerintah sebagai pemangku kepentingan langsung terkait kebijakan dan pelaku pengambilan keputusan dalam keterbukaan data pemerintah; (2) latar belakang responden dilihat dari beberapa aspek seperti posisi struktural dan jabatan fungsional responden terkait keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembukaan data ke publik; dan (3) ketersediaan alokasi nara sumber yang dapat mewakili sampel potret pemangku kepentingan pada instansi internal pemerintah.

2. Persiapan protokol wawancara (*interview protocol preparation*). Protokol wawancara menguraikan tujuan penelitian dan langkah-langkah yang harus diikuti dan merujuk pada dewan etika penelitian (*Research Ethics Board*) yang telah ditentukan oleh universitas atau perguruan tinggi asal peneliti saat mengajukan permohonan peninjauan. Menulis protokol terperinci sebelumnya akan memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan secara menyeluruh terkait pertanyaan wawancara utama, dan kemungkinan pertanyaan tindak lanjut untuk mencari informasi yang diperlukan. Sementara itu, rancangan protokol wawancara dapat terurai antara lain sebagai berikut: (1) deskripsi pertanyaan primer dan sekunder. Disini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan utama terkait peran dan minat para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan keterbukaan data. Sebagai contoh, beberapa pertanyaan terbuka (*open questions*) kepada responden dari pengambil keputusan (*decision-makers*) adalah (a) *Apakah anda mengetahui manfaat dan potensi resiko dalam keterbukaan data ke ranah publik?* (b) *Menurut anda, apakah peran anda*

sebagai pengambil keputusan adalah pemegang otoritas tertinggi untuk pengambilan keputusan tanpa perlu intersepsi dari pemangku kepentingan lainnya? dan (c) *Jika sebuah kumpulan dataset diprediksi memiliki potensi risiko seperti identitas pribadi dari warga negara atau masyarakat, apakah yang dilakukan oleh anda dan pemangku kepentingan lainnya?* Daftar pertanyaan-pertanyaan terbuka ini juga disiapkan untuk pemangku kepentingan lainnya dengan beberapa penyesuaian konteks pertanyaan yang menyesuaikan posisi struktur dan jabatan fungsional mereka.

3. Menentukan peran dari tim pewawancara (*determine the role of the interviewer*). Dalam beberapa kajian literatur disampaikan bahwa meskipun banyak penekanan ditempatkan dalam menulis daftar pertanyaan yang tepat kepada responden, namun demikian lebih daripada itu peran utama dari seorang pewawancara adalah sebagai pendengar yang baik [9]. Pewawancara harus mampu dan terampil dalam menjaga suasana dan lingkungan nyaman selama proses pengumpulan data atau wawancara berlangsung. Sebagai contoh, pewawancara dapat mengembalikan poin-poin pertanyaan kepada narasumber kembali ke jalurnya jika terdapat respon yang tidak fokus dan melebar dari ruang lingkup pertanyaan. Meskipun memiliki kemungkinan bias dalam pelaksanaan wawancara, namun pewawancara tetap harus mampu menangkap pesan positif dan negatif dari responden.

Berikut adalah demografi dari 48 responden yang bersedia dan terlibat dalam pengumpulan data pada penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Demografi responden wawancara

Asal administratif responden	Peran responden	Jumlah responden
Pemerintah Provinsi	Pengambil keputusan (<i>Decision-maker</i>)	2

	Analisis data (<i>data analyst</i>)	8
	Pelayan data (<i>data evangelist</i>)	7
Pemerintah Kota	Pengambil keputusan (<i>Decision-maker</i>)	2
	Analisis data (<i>data analyst</i>)	10
	Pelayan data (<i>data evangelist</i>)	9
	Total	48

2.2 Kajian literatur

Dalam rangka penguatan landasan teori terkait pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan insiatif keterbukaan data termasuk tinjauan manfaat dan risikonya, maka penelitian ini melaksanakan kajian literatur terhadap penelitian sebelumnya berdasarkan relevansi wilayah penelitian dan teoritis.

2.2.1 Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Mengelola pemangku kepentingan terdiri dari mengidentifikasi orang dan aktor kunci, kelompok, atau organisasi yang dapat berdampak positif dan negatif terhadap proses pengambilan keputusan [10]. Berbagai kategori pemangku kepentingan mungkin sulit untuk diakomodasi, namun keterlibatan mereka dapat diidentifikasi dengan menangkap perhatian dan kebutuhan mereka yang sebenarnya [11]. Oleh karena itu, analisis pemangku kepentingan sering digunakan untuk memahami kekhawatiran di antara pemangku kepentingan, menangkap peran dan kepentingan mereka, dan memilih pengambilan keputusan terbaik yang mungkin berdampak pada tujuan dan agenda organisasi mereka [12].

Dalam domain keterbukaan data pemerintahan (*open government data*), latar belakang pemangku kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan seringkali heterogen [13]. Pembukaan data sering

direkomendasikan oleh pengambil kebijakan dalam internal pemerintah untuk memastikan bahwa semangat *open data* dapat menuai manfaat, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi [14].

Beberapa aktor kunci seperti pengambil keputusan (*decision-maker*), dewan eksekutif (*executive board*), dan pembuat kebijakan (*policy maker*) dapat mengintervensi atau bahkan memveto keputusan dan menetapkan kebijakan untuk membuka proses pengambilan keputusan data [15]. Disaat yang sama, jenis pemangku kepentingan lainnya, seperti pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kumpulan data dapat mengelola kemajuan proses pengambilan keputusan saat ini, waktu terbaik untuk membuat keputusan, dan kemungkinan hasil dari keputusan yang dibuat [16]. Pemangku kepentingan tidak langsung mungkin mengatur kondisi seperti pengembang perangkat lunak dengan memastikan dukungan perangkat lunak untuk membuka data, sementara yang lain menetapkan kebijakan seperti petugas privasi dengan menentukan aturan data mana yang dapat dibuka. Lebih jauh, beberapa pemangku kepentingan menetapkan kebijakan dan mempertimbangkan perkiraan keuntungan dan kerugian dari pembukaan data, sementara yang lain cenderung fokus pada pemberian masukan dan analisis teknis untuk mengambil keputusan [17].

2.2.2 Klasifikasi Pemangku Kepentingan

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan peran dan minat pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan keterbukaan data. Oleh karena itu, dalam studi literatur, diperlukan teori dan rujukan terkait klasifikasi pemangku kepentingan pada domain *open government data* (OGD). Mengklasifikasikan pemangku

kepentingan OGD memungkinkan pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk mengelola kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan secara strategis [14]. Secara umum, ada tiga manfaat utama mengklasifikasikan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, sebagai berikut [18]: (1) dapat mengelola waktu untuk dihabiskan bersama setiap pemangku kepentingan. Pengambil keputusan dan pembuat kebijakan secara alami mengelola ruang lingkup proses pengambilan keputusan, garis waktu, kemungkinan investasi, dan atribut lainnya sambil mengelola pemangku kepentingan. Pengambil keputusan harus memutuskan berapa banyak waktu yang diinvestasikan dalam setiap proses pengambilan keputusan untuk membuka data mulai dari menetapkan tujuan, memilih kumpulan data, menganalisis perkiraan keuntungan dan konsekuensi kerugian, dan waktu untuk memutuskan apakah akan membuka atau tidak. untuk membuka kumpulan data; (2) dapat memahami peran dan kepentingan paling penting dari setiap pemangku kepentingan. Mengklasifikasikan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat posisi mereka untuk setiap peran dan kepentingan mungkin sangat berguna bagi para pembuat keputusan. Setiap pemangku kepentingan di bidang OGD menunjukkan perpaduan unik antara keahlian, legitimasi, rasa urgensi, kemungkinan manfaat yang dirasakan, dan potensi risiko yang merugikan. Oleh karena itu, mengklasifikasikan pemangku kepentingan harus mendefinisikan peran, kepentingan, dan kebutuhan esensial masing-masing pemangku kepentingan, dan (3) dapat menentukan tingkat kepentingan dan kepedulian masing-masing pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pengambil keputusan harus memprioritaskan tingkat kepentingan pemangku kepentingan

berdasarkan potensi dampak pada perhatian mereka pada proses pengambilan keputusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari pengambilan data dengan studi kasus dan Teknik wawancara terhadap pemangku kepentingan di internal pemerintah ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk membuka atau menganalisis kumpulan data pemerintah. Ada dua langkah utama untuk mengembangkan kisi peran kepentingan dari proses pengambilan keputusan dalam domain data terbuka. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan membangun peran-kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda untuk menunjukkan posisi dan tingkat masing-masing pemangku kepentingan dalam empat kuadran. Kedua, peneliti menganalisis proses pengambilan keputusan untuk memetakan peran dan minat mereka ke dalam tabel pemetaan posisi saat ini dan ekspektasi dari peran dan minat mereka sesuai dengan hasil pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan.

3.1 Identifikasi Peran Dan Minat Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan beberapa pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam keterbukaan data. Pemangku kepentingan utama tersebut berasal dari entitas internal pemerintah, termasuk pembuat keputusan (*decision-makers*), analis data (*data analysts*), dan pelayan data (*data evangelists*). Selain itu, pemangku kepentingan utama merujuk pada aktor penerbit data yang memiliki hubungan formal, resmi, hierarkis, dan kontraktual. Aktor-aktor ini memiliki peran langsung dan derajat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para responden, maka penelitian ini

mendapatkan deskripsi peran dan minat pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1. Para pembuat keputusan (*decision-makers*), memiliki otoritas dan pengaruh yang kuat dan minat yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan agenda pembuatan kebijakan dan menerjemahkan ide-ide tersebut ke dalam kebijakan. Hal ini disampaikan oleh satu pemegang otoritas keputusan terkait pertanyaan "Menurut anda, apakah peran anda sebagai pengambil keputusan adalah pemegang otoritas tertinggi untuk pengambilan keputusan tanpa perlu intersepsi dari pemangku kepentingan lainnya? Untuk pertanyaan ini, mereka memberikan respon seperti dikutip dalam sesi wawancara adalah "sebagai individu yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menentukan keputusan untuk membuka atau tidak membuka data, tentunya kami memerlukan masukan dan pandangan dari pihak lain, seperti analis data dan pejabat pemegang kebijakan lainnya. Hal ini untuk memberikan pandangan yang lebih dalam dan komprehensif kepada kami sebelum mengambil keputusan. Jadi, terkadang dalam beberapa kasus kami memang membutuhkan intersepsi dalam arti yang konstruktif sebagai referensi dalam mengambil keputusan yang dirasa rumit".

Disaat yang sama, pengambil keputusan bertanggung jawab untuk menetapkan alternatif keputusan dan minat yang tinggi untuk menggunakan kembali kumpulan data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Para pengambil keputusan harus mematuhi kebijakan yang diberikan oleh lembaga pemerintah melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi seluas-luasnya untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

2. Para analis data (*data analysts*), memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dan menimbang perkiraan risiko dan manfaat dari pengungkapan data. Mereka semua memiliki peran dan kepentingan yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh beberapa dari mereka terkait salah satu pertanyaan yang diajukan dalam sesi wawancara, yaitu "Jika sebuah kumpulan dataset diprediksi memiliki potensi risiko seperti identitas pribadi dari warga negara atau masyarakat, apakah yang dilakukan oleh anda dan pemangku kepentingan lainnya? Pewawancara mendapatkan respon yang beragam terkait dengan pertanyaan ini. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa mereka para analis data akan melakukan perlakuan tertentu terhadap kumpulan data tersebut. Perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah dengan memberikan pertimbangan untuk melakukan analisis manfaat dan biaya serta memberikan anonimisasi terkait data atau informasi yang diprediksi akan berpotensi risiko seperti identitas pribadi seseorang yang melekat pada kumpulan data tersebut.
3. Para pelayan data (*data evangelists*), berperan sebagai petugas yang memiliki keterampilan teknis yang mendalam untuk memecahkan masalah kompleks dengan penggunaan bidang interdisipliner, proses, dan algoritma untuk mengekstrak wawasan dari kumpulan data terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti, para pelayan data ini memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan, salah satu diantaranya adalah "Apakah anda mengetahui manfaat dan potensi resiko dalam keterbukaan data ke ranah publik? Untuk pertanyaan ini, sebagai besar dari mereka memberikan tanggapan bahwa mereka secara teknis mengetahui potensi dan peluang terjadi pelanggaran privasi atau terungkapnya risiko dalam membuka data ke wilayah

publik. Seperti salah satu kutipan tanggapan dari pelayan data yang didapat adalah ”kami secara teknis memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pelanggaran hak privasi dari sebuah atribut pribadi yang dimiliki oleh kumpulan data. Oleh karena itu, biasanya kami akan membuat analisis yang sesuai dengan kedalaman risikonya. Hasil analisis ini kemudian akan kami sampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas pengambil kebijakan untuk diambil keputusan apakah akan membuka atau dapat diambil keputusan alternatif seperti memberikan batasan akses atau bahkan menolak untuk membuka data tersebut”.

Dari tanggapan dan respon ketiga sumber pemangku kepentingan ini, kemudian peneliti membangun pemetaan terkait peran dan minat para pemangku kepentingan dalam membuka kumpulan data ke publik, seperti yang ditampilkan pada tabel 2. Pemetaan ini merupakan hasil wawancara semi-struktur yang disajikan secara kualitatif sesuai dengan metode pengumpulan data yang telah ditentukan.

3.2 Pemetaan Peran Dan Minat Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Dari pemetaan peran dan minat pemangku kepentingan dari hasil wawancara yang dilakukan seperti ditunjukkan pada tabel 2 adalah bentuk hasil analisis kualitatif.

Tabel 2. Pemetaan Peran Dan Minat Pemangku Kepentingan

Jenis pemangku kepentingan	Peran pemangku kepentingan saat ini (current state)	Ekspektasi peran (desired state)
Pengambil keputusan (decision-maker)	Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan	Harus ada petunjuk dan referensi yang jelas terkait alokasi waktu yang dibutuhkan dalam rangka efektifitas

	Menentukan seberapa besar manfaat dan biaya yang diperlukan dalam pengambilan dan paska keputusan	Pengambil keputusan harus mampu memutuskan apakah kumpulan data memiliki nilai efisiensi jika dilepas ke publik
	Menentukan tujuan dan agenda strategis terkait inisiatif keterbukaan data	Harus ada blueprint yang mengatur dengan jelas target capaian tujuan dari inisiatif keterbukaan data
Analisis data (data analyst)	Melakukan analisis untuk menimbang perkiraan risiko dan manfaat dari pengungkapan data	Metode analisis yang digunakan harus tepat dan komprehensif dengan merujuk kepada peraturan dan perundangan yang berlaku
	Menyediakan alat analisis yang dapat membantu pihak pengambil keputusan	Alat analisis yang digunakan harus memperhatikan aspek dampak teknis, sosial, dan juga perubahan politik
Pelayan data (data evangelist)	Melakukan analisis teknis yang mendalam terkait potensi risiko dan manfaat data	Metode analisis yang digunakan harus independen sebagai bentuk transparansi
	Menyediakan portal sistem analisis data yang dapat digunakan lintas pemangku kepentingan terkait status kumpulan data	Portal sistem informasi keterbukaan data harus secara non-teknis dapat membantu dan mengedukasi pemangku kepentingan

Dengan terbentuknya pemetaan ini, maka peneliti dapat memberikan interpretasi dan pandangan, sebagai berikut:

Pertama, bahwa dengan perannya yang penting dan krusial, pengambil keputusan (*decision-makers*) harus memiliki referensi yang jelas ketika mengambil keputusan. Selain itu, aspek efisiensi manfaat dan biaya juga harus menjadi pertimbangan serius karena terkait investasi yang mahal akan pembangunan portal keterbukaan data. Lebih lanjut, pengambil keputusan juga harus memiliki rencana strategis dan indikator yang jelas untuk memastikan bahwa tujuan dan inisiatif keterbukaan data dapat tercapai dengan baik.

Kedua, analisis data adalah sosok sentral yang memegang peran untuk menimbang kemungkinan risiko dan manfaat dari keterbukaan data. Oleh karenanya, analisis data harus memiliki metode yang jelas dan tepat dengan tetap merujuk pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain itu, dalam menggunakan teknik analisisnya, mereka juga harus memperhatikan aspek non-teknis lainnya seperti aspek sosial, kepekaan masyarakat, dan juga perubahan politik.

Ketiga, bahwa pelayan data adalah aktor penting dalam melakukan analisis mendalam terkait potensi risiko yang ada jika kumpulan data dinyatakan dibuka untuk publik. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan metode analisis yang bebas dari intervensi atau independen sebagai wujud semangat transparansi. Terakhir, sebagai pemangku kepentingan yang berurusan dengan manajemen portal keterbukaan data, maka disaat yang sama mereka juga harus secara non-teknis mampu membantu mengedukasi lintas pemangku kepentingan. Semangat edukasi ini akan membantu instansi pemerintah untuk tetap konsisten dalam perannya sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel.

4. SIMPULAN

Berdasarkan studi kualitatif yang dilakukan, penelitian ini menemukan perbedaan peran dan minat di antara pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran, perhatian, dan kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan untuk

mengungkapkan kumpulan data. Penelitian ini telah berhasil membangun dan membuat pemetaan peran serta minat ketiga pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dalam membuka data. Berdasarkan hasil studi kasus dengan pendekatan wawancara semistruktur, dapat disimpulkan bahwa pengambil keputusan lebih fokus kepada faktor efisiensi manfaat dan risiko. Analisis data memiliki peran penting dalam menimbang manfaat dan risiko. Sementara pelayan data berperan dalam hal analisis teknis mendalam untuk membantu pengambilan keputusan berbasis bukti atau referensi yang kuat.

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memberikan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam bentuk pemetaan peran dan minat untuk mengubah keadaan saat ini dari posisi pemangku kepentingan ke keadaan yang diinginkan dalam agenda masa depan. Namun demikian, klasifikasi pemangku kepentingan dalam penelitian ini harus digeneralisasi dengan cermat karena hanya mewakili satu studi kasus saja. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi penelitian lanjutan, dapat menggunakan studi kasus yang berbeda dan pengaturan empiris yang lebih ketat untuk menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan kepentingan pemangku kepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] F. Ackermann and C. Eden, "Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice," *Long Range Planning*, vol. 44, no. 3, pp. 179–196, Jun. 2011, doi: 10.1016/j.lrp.2010.08.001.
- [2] M. Martin, M. Kaltenböck, and S. Auer, "The Open Government Data Stakeholder Survey," 2011. [Online]. Available: <http://www.semantic-web.at/>
- [3] H. Moura and J. C. Teixeira, "Managing Stakeholders Conflicts," *Business*, 2010, doi: DOI:10.1002/9781444315349.CH17.

- [4] A. Luthfi, M. Janssen, and J. Cromptvoets, "A Framework for Analyzing How Governments Open Their Data: Institution, Technology, and Process Aspects Influencing Decision-Making," 2018.
- [5] A. Luthfi, M. Janssen, and J. Cromptvoets, "A Causal Explanatory Model of Bayesian-belief Networks for Analysing the Risks of Opening Data," in *BMSD 2018*, vol. 319, 2018, pp. 289–297. doi: 10.1007/978-3-319-94214-8_20.
- [6] G. Williams, *Applied Qualitative Research Design*. ED-TECH PRESS, 2019.
- [7] M. Catherine and R. Gretchen B., *Designing qualitative research*, SAGE Publishing, 2010.
- [8] M. Ishtiaq, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches," *English Language Teaching*, vol. 12, no. 5, p. 40, Apr. 2019, doi: 10.5539/elt.v12n5p40.
- [9] A. Bolderston, "Conducting a research interview," *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, vol. 43, no. 1, pp. 66–76, Mar. 2012, doi: 10.1016/j.jmir.2011.12.002.
- [10] A. Luthfi, M. Janssen, and J. Cromptvoets, "Stakeholder tensions in decision-making for opening government data," in *Lecture Notes in Business Information Processing*, 2020, vol. 391 LNBIP, pp. 331–340. doi: 10.1007/978-3-030-52306-0_23.
- [11] T. Roeder, "Categorizing Stakeholders," in *Managing Project Stakeholders*, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013, pp. 19–29. doi: 10.1002/9781118654491.ch2.
- [12] S. de Mascia, "Managing Difficult Stakeholders," 2015. [Online]. Available: www.pmworlplibary.net
- [13] F. Gonzalez-Zapata and R. Heeks, "The multiple meanings of open government data: Understanding different stakeholders and their perspectives," *Government Information Quarterly*, vol. 32, no. 4, pp. 441–452, Oct. 2015, doi: 10.1016/j.giq.2015.09.001.
- [14] P. McDermott, "Building open government," *Government Information Quarterly*, vol. 27, no. 4, pp. 401–413, Oct. 2010, doi: 10.1016/j.giq.2010.07.002.
- [15] A. Luthfi and M. Janssen, "A Stakeholders Taxonomy for Open Government Data Decision-making," 2021.
- [16] A. Krotoski, "Data-driven research: open data opportunities for growing knowledge, and ethical issues that arise," *Data-driven research*, vol. 24, no. 1, 2012.
- [17] M. Heimstädt, F. Saunderson, and T. Heath, "Conceptualizing Open Data Ecosystems: A timeline analysis of Open Data development in the UK," 2014.
- [18] R. Matheus, M. Janssen, and T. Janowski, "Design principles for creating digital transparency in government," *Government Information Quarterly*, vol. 38, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.giq.2020.101550.